



## Penyediaan Lahan Makam Belum Bisa Tahun Ini

YOGYA (KR) - Keterbatasan lahan pemakaman di Kota Yogya hingga kini belum mendapatkan solusi. Kendati penyediaan lahan baru dapat dilakukan di luar Kota Yogya, namun belum dapat direalisasikan di tahun ini. Kalangan dewan pun akan membahas secara mendalam setelah kepala daerah definitif berhasil ditetapkan.

"Tahun lalu persoalan keterbatasan lahan pemakaman yang tersedia sudah kami bahas. Bahkan ada rekomendasi untuk pengadaan lahan baru serta optimalisasi lahan yang sudah ada. Tapi kelanjutannya menunggu walikota terpilih karena menyangkut kebijakan fundamental," papar Ketua Komisi D DPRD Kota Yogya, Agung Damar Kusumandaru, Rabu (19/4).

Agung Damar mengaku, Pemda DIY sebenarnya juga sudah melakukan kajian terkait areal pemakaman yang ada di daerah. Sehingga, jika di Kota Yogya sudah tidak memungkinkan pengadaan makam baru karena kesulitan lahan, maka dapat mencari lahan di luar kota asalkan masih dalam satu provinsi.

Namun kebijakan membeli lahan di luar kota perlu didukung regulasi. Terutama revisi Perda 7/1996 tentang Tempat Pemakaman di Kota Yogya. "Karena terkait revisi regulasi, maka dibutuhkan kebijakan walikota definitif. Sehingga, begitu walikota terpilih dilantik, kami akan mengusulkan pembahasan lintas komisi supaya mendapat dukungan lebih luas," urainya.

Terkait kondisi pemakaman di Kota Yogya saat ini, diakuinya sudah tidak ada yang kosong sejak beberapa tahun lalu. Akibatnya, warga Kota Yogya terpaksa mencari lahan makam yang dikelola oleh umum maupun pemakaman keluarga. Biaya pengurusannya pun mencapai jutaan rupiah hingga sulit dijangkau oleh warga ekonomi menengah ke bawah.

Selain itu, lahan pemakaman yang dikelola oleh Pemkot Yogya juga hanya ada empat unit, masing-masing berada di Kecamatan Wirobrajan, Mantrijeron, Mergangsan dan Tegalrejo.

"Sebenarnya sudah ada skema pemberian santunan kematian sebesar Rp 1,2 juta bagi tiap anggota keluarga tidak mampu yang meninggal dunia. Tapi bantuan itu juga belum mencukupi kebutuhan pengurusan jenazah," tandasnya. (Dhi)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Oktober 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005